



BULETIN

A.7.c.9

SANGKAKALA

MENYUARAKAN PEMBAHARUAN DAN KEMAJUAN

ISSN 0216-3609

Edisi Ke Tujuh Belas Tahun 2014

Menggagas Perpustakaan Sekolah Untuk Generasi Z

Keistimewaan Yogyakarta :
**Peran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Web discovery : Format Masa Depan
Temu Kembali Informasi Digital**

**Eksistensi Kompetensi Pustakawan
Melalui Sertifikasi**

**Learning Park BPAD DIY
“Tempat Nongkrong Sambil Belajar”**



SANGKAKALA

STT : 605/SK/Ditjend PPG/SPT/1979
ISSN 0216 - 3609

Diterbitkan oleh :
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

Penanggung Jawab
Budi Wibowo, SH, MM.
Redaktur
Dewi Ambarwati, S.Sos., M.AP.
Penyunting/Editor
Wahyu Dona Pasa S., SIP.
Juru Gambar/Penata Layout
Zulfa Kurniawan, SIP.
Sekretariat
Rini Handayani, SE., M.Si.

Alamat Redaksi

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 29
Telepon : (0274) 513969, email : layanan.bpaddiy@yahoo.com
Yogyakarta - 55231

Redaksi menerima naskah dari pihak manapun, dengan catatan ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti, 1 1/2 spasi, besar huruf panjang maksimal 6 lembar folio, lebih baik disertakan foto atau ilustrasi. Redaksi berhak mengedit naskah sesuai dengan yang dibutuhkan dan naskah yang masuk menjadi milik redaksi, keputusan pemuatan ada pada redaksi.

Daftar Isi

Menggagas Perpustakaan Sekolah Untuk Generasi Z Oleh: Noorika Retno Widuri	2
Keistimewaan Yogyakarta : Peran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh: Fransisca Rahayuningsih	7
Web Discovery : Format Masa Depan Temu Kembali Informasi Digital Oleh: Heri Abi Burachman Hakim	12
Layanan Prima Perpustakaan; Upaya Meningkatkan Kepuasan Pemustaka Oleh : Retno Sukesi	17
Literasi Informasi dan SCL (Student Centre Learning) di Lingkungan Pendidikan Tinggi Oleh : Sunarno	20
Eksistensi Kompetensi Pustakawan Melalui Sertifikasi Oleh: Suharyanto	25
Efektivitas OPAC Dengan Program INLIS Sebagai Sarana Temu Kembali Informasi di BPAD DIY Oleh: Sri Ambarwati	30
Menjadi Pustakawan Berprestasi Oleh: Sukirno	35
Pentingnya Pendidikan Tatakrama Dalam Kehidupan (Menyikap Serat tatakrama Jawi) Oleh: Titi Mumfangati	39
Resensi Heroshima : Ketika Bom Dijatuhkan Oleh: Wahyu Dona Pasa Sulendra, S.IP.	42
Profil Layanan Learning Park BPAD DIY Oleh: Wiwik Tarmini, S.IP.	43
Snapshot	44

Keistimewaan Yogyakarta : Peran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Oleh : Fransisca Rahayuningsih*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah secara resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang tersebut diyakini sebagai bentuk pengakuan Pemerintah sekaligus penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Alasan pemberian Predikat "Yogyakarta Istimewa" adalah karena Yogyakarta kaya akan potensi budaya, baik budaya bendawi yang kasat mata (*tangible culture*) maupun yang berwujud sistem nilai (*intangible culture*). Yogyakarta juga dikenal sebagai kota dengan berbagai predikat seperti Kota Perjuangan, Kota Pelajar, Kota Kebudayaan, Kota Pariwisata, Kota Gudeg, dan Kota Sepeda yang cukup menggambarkan keistimewaannya. Selain itu dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Sementara di dunia kepustakawanan, DIY juga memiliki banyak keunggulan, antara lain Yogyakarta merupakan tempat pendirian Perpustakaan Negara; Perpustakaan Perguruan Tinggi (PT) di Yogya memelopori pembuatan "kartu pintar"; Kepala Perpustakaan Negara Yogyakarta tahun 1950, R. Patah, mendampingi AGW Dunningham melakukan survei di berbagai provinsi; Di Yogyakarta dimulai kegiatan "*maos lan mirengaken*" yaitu pembacaan kitab/buku untuk komunitas sebagai upaya penyebaran literasi informasi berbasis pendekatan lokal; Karya Anthony Reid, *List of serials in Yogyakarta* merupakan katalog induk surat kabar yang paling lengkap mengenai surat kabar/Koran/harian terbitan Indonesia antara periode 1945-1949; Ketika terjadi kevakuman asosiasi pustakawan tahun 1960-an hingga awal 1970-an, di Yogya telah berdiri Himpunan Pustakawan DIY; Keunggulan tersebut menjadi peluang bagi pustakawan untuk dapat berperan dalam keistimewaan Yogyakarta.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) bersama Dewan Perpustakaan DIY telah mengambil peran dalam keistimewaan Yogyakarta dengan mendata cagar budaya; Menjembatani gap pengelola perpustakaan cagar budaya; Mengalihbentuk koleksi Perpustakaan Tamansiswa; Mendampingi pengelola Museum Sonobudoyo Yogyakarta dalam hal Fumigasi, alihmedia dan pengolahan koleksinya; Membuat kotak pelindung untuk koleksi yang rapuh agar bisa tegak kembali di Perpustakaan Keraton dan Puro Pakualaman.

Gagasan pengembangan peran pustakawan di Yogyakarta adalah membuat portal untuk menampung semua aktivitas masa lalu dari kota Yogyakarta, misalnya dalam "Yogyakarta Memory"; Membuat portal untuk menampung semua khasanah "Keistimewaan Yogyakarta"; Membuat sebuah "Event" yang tujuannya mempromosikan khasanah budaya Yogyakarta; Membuat komunitas "cagar budaya Yogyakarta", misalnya perpustakaan, museum, paguyuban yang ada di Yogyakarta.

Kata kunci: Keistimewaan Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan, Cagar Budaya, Peran Pustakawan

A. Pendahuluan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2012 dinyatakan oleh pemerintah sebagai daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Secara resmi

Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY (UUK DIY) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yog-

yakarta memang istimewa, karena Yogyakarta kaya akan potensi budaya, baik budaya bendawi yang kasat mata maupun yang berwujud sistem nilai. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota dengan berbagai predikat seperti

*. <http://dppka.jogjaprovo.go.id/document/infoyogyakarta.pdf>

Kota Perjuangan, Kota Pelajar, Kota Kebudayaan, Kota Pariwisata, Kota Gudeg, dan Kota Sepeda yang cukup menggambarkan keistimewaannya. Selain itu dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.¹

Berbicara mengenai “potensi budaya Yogyakarta” yang menjadi salah satu bahasan dalam UUK DIY tentu menjadi masalah yang menarik manakala dikaitkan dengan peran pustakawan, dalam hal ini Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY. Pintu masuk bagi pustakawan di BPAD untuk menjalankan peran dalam Undang-Undang tersebut adalah melalui pasal 4 dan pasal 5.

Pada pasal 4 UUK DIY menyatakan bahwa “Pengaturan Keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan asas pendayagunaan kearifan lokal”. Sementara pada pasal 5 menyatakan bahwa “Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa”. Lebih lanjut pada pasal 5 ayat 6 dijabarkan bahwa “Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY”.

Sementara jika keistimewaan Yogyakarta dikaitkan dengan Un-



Ilus : www.kdri.web.id

dang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

1. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
3. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
6. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan keahasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Dari kedua isi undang-undang tersebut di atas jika dikaitkan dengan peran pustakawan, pada sisi mana pustakawan dapat berperan khususnya dalam menjaga dan mengem-

bangkan budaya Yogyakarta? Tulisan ini akan mencoba mengulas Peran Pustakawan di BPAD dalam Pengembangan Perpustakaan Cagar Budaya Yogyakarta dan gagasan pengembangan peran yang harus dilakukan oleh BPAD.

B. Keistimewaan Yogyakarta Sebagai Tantangan Pustakawan

Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 terdiri atas 16 bab dan 51 pasal. Pada Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Lebih lanjut dalam ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “keistimewaan” adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 3, adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pengaturan Keistimewaan DIY terdapat pada pasal 4, di mana pengaturan keistimewaan dilaksanakan berdasarkan asas: pengakuan atas hak asal-usul; kerakyatan; demokrasi; ke-bhinneka-tunggal-ika-an; efektivitas pemerintahan; kepentingan nasional; pendayagunaan kearifan lokal. Pada pasal ini, khususnya berkenaan dengan pendayagunaan kearifan lokal dapat menjadi bagian perpustakaan dalam pelaksanaannya.

Sementara dalam pasal 5 dijelaskan bahwa Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis.
2. Mewujudkan kesejahteraan dan

- ketenteraman masyarakat.
3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Menciptakan pemerintahan yang baik.
 5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pada pasal 5 ayat 6 ditambahkan bahwa Pelembagaan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan melalui pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY, undang-undang ini mengatur pendanaan keistimewaan yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Berdasarkan Pasal 42, pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

Dana tersebut dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan keistimewaan DIY kepada pemerintah melalui Menteri Dalam

Negeri pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Jika merujuk pada pasal 4 dan 5 undang-undang tersebut, yang menyangkut mengenai pendayagunaan kearifan lokal, pemeliharaan, pendayagunaan, serta pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY tentunya pustakawan dapat ambil bagian.

C. Keunggulan Yogyakarta Dalam Dunia Kepustakawanan Sebagai Peluang

Sebutan Istimewa untuk Yogyakarta ternyata dapat juga diberikan dalam bidang kepustakawanan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki catatan sejarah yang patut dibanggakan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Profesor Sulisty Basuki, seorang pakar di bidang Kepustakawanan Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Sulisty Basuki memberikan beberapa keunggulan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. Yogyakarta merupakan tempat pendirian Perpustakaan Negara (kini dikenal dengan berbagai nama seperti Badan Perpustakaan dan Arsip* Provinsi, Badan Arsip dan perpustakaan provinsi; Badan perpustakaan provinsi dll) pada 19 Desember 1949; pola perpustakaan negara ini kelak menjadi contoh bagi perpustakaan negara di semua provinsi di Indonesia. Perpustakaan negara kemudian menjadi organ Perpustakaan Nasional RI.
2. Perpustakaan perguruan tinggi (PT) di Yogya memelopori pembuatan "kartu pintar" untuk membantu pemustaka dalam mendayagunakan sumber daya informasi yang terdapat di berbagai perpustakaan. Dengan berbekal kartu pintar seorang mahasiswa dapat mengunjungi perpustakaan

PT di Yogyakarta.

3. Kepala Perpustakaan Negara Yogyakarta tahun 1950, R. Patah, mendampingi AGW Dunningham melakukan survei di berbagai provinsi. Laporan survei itu kelak menjadi dasar pembangunan Perpustakaan nasional RI. R. Patah tercatat sebagai konsultan pendamping yang pertama di Indonesia.
4. Di Yogyakarta dimulai kegiatan "maos lan mirengaken" yaitu pembacaan kitab/buku untuk komunitas sebagai upaya penyebaran literasi informasi berbasis pendekatan lokal. Lazimnya diadakan pada waktu kelahiran bayi, kematian, peresmian rumah dll. Awal dari "story telling" dan "literasi kearifan lokal".
5. Karya Anthony Reid, List of serials in Yogyakarta merupakan katalog induk surat kabar yang paling lengkap mengenai surat kabar/Koran/harian terbitan Indonesia antara periode 1945-1949.
6. Ketika terjadi kevakuman asosiasi pustakawan tahun 1960-an hingga awal 1970-an, di Yogya telah berdiri Himpunan Pustakawan Daerah Istimewa Yogyakarta; kemudian bersama-sama dengan Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia (HPCI) serta sisa-sisa pengurus Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI) pada bulan Juli 1973 memutuskan berdirinya organisasi pustakawan bernama Ikatan Pustakawan Indonesia (I.P.I.) hingga sekarang.

Terkait dengan keunggulan kearifan lokal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Ibu Monica Nur Lastiyani dalam wawancara menyampaikan bahwa ada beberapa cagar budaya di Daerah

Istimewa Yogyakarta yang perlu dilestarikan, dimana di dalamnya men-goleksi koleksi cetak, naskah kuno dan manuskrip yaitu Perpustakaan Kraton Yogyakarta, Perpustakaan Puro Pakualaman, Perpustakaan Tamansiswa, dan Museum Sonobudoyo.

Berbagai keunggulan Yogya-karta seperti tersebut di atas dapat di-jadikan peluang dan pemacu seman-gat bagi pustakawan di Yogyakarta untuk berperan dalam keistimewaan DIY sehingga tujuan keistimewaan DIY dapat tercapai.

D. Peran Pustakawan BPAD dalam Pengembangan Perpustakaan Cagar Budaya Yogyakarta

Apabila kita mendengar kata “perpustakaan”, barangkali gamban spontan yang muncul dalam pikiran kita adalah sebuah gedung tempat menyimpan buku, yang dipenuhi dengan rak-rak berisi buku. Gambaran semacam itu tidak dapat di-katakan salah, karena dalam bahasa Indone-sia kata “pustaka” memang berarti “buku”. Akan tetapi kalau dikaji lebih mendalam gambaran itu masih jauh dari pemahaman yang tepat menge-nai perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya ber-kaitan dengan gedung dan buku saja, tetapi juga dengan sis-tem penyimpanan, pe-meliharaan, dan pengguna. Sesungguhnya, per-pustakaan adalah suatu kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pengembangan koleksi, bagian pengolahan koleksi, bagian pelayanan pengguna, bagian administrasi, dan bagian pemeli-haraan sarana-prasarana. Berbagai unsur terlibat dalam pengelolaan per-pustakaan, antara lain sumber daya manusia, pengguna, sarana-prasara-na, ber-bagai fasilitas pendukung, dan yang terpenting adalah koleksi yang disusun ber-dasarkan sistem tertentu.

Dengan demikian, suatu per-pustakaan sekurang-kurangnya harus meliputi lima unsur sebagai berikut:

Bahan pustaka, baik dalam bentuk tercetak maupun dalam bentuk non cetak; Sistem tertentu untuk mem-proses atau mengolah bahan pustaka; Ruang untuk menempatkan bahan pustaka yang telah diproses; Peng-guna yang memanfaatkan bahan pustaka koleksi perpustakaan; Petu-gas yang melayani semua kegiatan perpustakaan. Secara garis besar tu-gas perpustakaan adalah:

1. Mengumpulkan bahan pusta-ka, yaitu secara terus-menerus meng-himpun sumber informasi yang relevan untuk dikoleksi.
2. Mengolah atau memproses bahan pustaka berdasarkan suatu sistem tertentu.
3. Melayankan bahan pustaka yang dikoleksi kepada para penggu-nanya.
4. Menyimpan dan memelihara, yaitu mengatur, menyusun, dan memeli-hara, agar koleksi rapi, bersih, awet, utuh, lengkap, dan mudah diakses.
5. Menjadi pusat informasi, sumber belajar, penelitian, preservasi, rekreasi, dan kegiatan ilmiah lain-nya.
6. Menjadi agen perubahan dan agen kebudayaan dari masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Peran yang sudah dilakukan pustakawan BPAD

Bagaimana peran pustakawan dalam mengelola perpustakaan cagar budaya di Yogyakarta, apakah sama dengan mengelola perpustakaan sep-erti yang telah diutarakan di atas? Umi Proboyekti, Ketua Dewan Per-pustakaan DIY menyatakan bahwa peran pustakawan dalam keistime-waan Yogyakarta harus dikaitkan dengan seni dan budaya Yogyakarta, yaitu bagaimana memperbaiki pusat budaya yang ada misalnya Keraton dan Pakualaman karena menyim-pan khasanah budaya Yogyakarta.

Pustakawan harus menjembatani gap pengelola cagar budaya yang ada se-hingga mereka dibekali dengan pen-getahuan pengelolaan perpustakaan yang baik. Sementara itu, Monika Nur Lastiyani menyatakan bahwa ter-kait dengan peran pustakawan dalam menjaga dan mengembangkan buda-ya Yogyakarta, yang sudah dilakukan oleh BPAD bekerja sama dengan De-wan Perpustakaan DIY adalah:

1. Mendata cagar-cagar budaya yang dapat dikembangkan di provinsi Daerah Istimewa Yog-yakarta. BPAD bersama Dewan Perpustakaan DIY telah melaku-kan upaya untuk mendata cagar budaya yang ada selain 4 cagar budaya yang telah disebutkan di atas, yaitu Perpustakaan Kraton Yogyakarta, Perpustakaan Puro Pakualaman, Perpustakaan Ta-mansiswa, dan Museum Sono-budoyo. Pencarian cagar budaya ini meliputi daerah: Kotagede, Imogiri, dan KHA. Dahlan. Di dae-rah Kotagede dan Imogiri tidak ditemukan perpustakaan cagar budaya, namun di KHA Dahlan ditemukan adanya “Perpustakaan Ahmad Dahlan” di mana kondis-inya memiliki sedikit koleksi, na-mun perpustakaan tidak terkelola dengan baik. Sementara ada juga “Perpustakaan Tamansiswa” yang memiliki banyak koleksi, memiliki petugas, namun perpustakaan ti-dak terkelola dengan baik.
2. Menjembatani gap pengelola per-pustakaan cagar budaya dengan bimbingan teknis perpustakaan, pengolahan koleksi, alih media, memberikan fasilitas rak dan fasili-tas AC.
3. Mengalihbentuk koleksi Per-pustakaan Tamansiswa yang beri-si “bahan ajar Ing ngarso sun tu-lodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” yang berisi falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantara.

4. Mendampingi pengelola Museum Sonobudoyo Yogyakarta dalam hal Fumigasi, alihmedia dan pengolahan koleksinya.
5. Membuat kotak pelindung untuk koleksi yang rapuh agar bisa tegak kembali di Perpustakaan Keraton dan Puro Pakualaman.

Gagasan pengembangan peran pustakawan

Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh BPAD dan Dewan Perpustakaan DIY di atas adalah upaya terarah dalam mengembangkan cagar budaya di Yogyakarta yang perlu mendapatkan apresiasi. Aktivitas tersebut harus selalu dilanjutkan, yaitu menjembatani gap pengelola perpustakaan, memfasilitasi alih media, fumigasi dan pengolahan koleksinya. Mengingat berbagai kegiatan di atas lebih ke arah pengelolannya, maka perlu dipikirkan serangkaian aktivitas agar koleksi yang sudah dikelola tersebut dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat Yogyakarta dan bahkan dunia. Perlu serangkaian aktivitas lain untuk mempromosikannya sehingga perpustakaan cagar budaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan kegiatan belajar seumur hidup masyarakat.

Berikut ini penulis memberikan tambahan gagasan peran pustakawan dalam upaya pengembangan perpustakaan cagar budaya yang ada di Yogyakarta, Antara lain:

1. Melanjutkan program yang sudah dilaksanakan BPAD dan Dewan Perpustakaan DIY.
2. Membuat portal untuk menampilkan semua aktivitas masa lalu dari kota Yogyakarta, misalnya dalam "Yogyakarta Memory". Dalam konsep "Yogyakarta Memory" ini akan menampilkan semua aktivitas napak tilas Yogyakarta tempo dulu yang dirancang untuk membawa masyarakat mengalami dan menikmati Yogyakarta.

3. Membuat portal untuk menampilkan semua khasanah "Keistimewaan Yogyakarta". Dalam konsep ini akan menampilkan semua aktivitas yang berkaitan dengan predikat Yogyakarta sebagai Kota Perjuangan, Kota Pelajar, Kota Kebudayaan, Kota Pariwisata, Kota Gudeg, dan Kota Sepeda yang cukup menggambarkan keistimewaannya.
4. Membuat sebuah "Event" yang pada tujuannya mempromosikan khasanah budaya Yogyakarta, misalnya Yogyakarta Memory di Mall. Kegiatannya dapat berupa pameran foto-foto, lomba mendongeng napak tilas Yogyakarta, pameran perpustakaan "cagar budaya" yang dimiliki misalnya Perpustakaan Keraton Yogyakarta.
5. Membuat komunitas "cagar budaya Yogyakarta", misalnya perpustakaan, museum, paguyuban yang ada di Yogyakarta. Dalam setiap kegiatan diberi pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bagaimana pengelolaan koleksi khasanah budaya yang dimiliki termasuk bagaimana mempromosikan sehingga dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

E. Penutup

Salah satu tujuan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta adalah melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Tujuan ini akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh partisipasi masyarakat.

Pustakawan sebagai bagian dari masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengambil peran dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui aktivitas bimbingan teknis perpustakaan, pengolahan

koleksi, alih media, memberikan fasilitas. Selain itu melalui aktivitas promosi sehingga perpustakaan cagar budaya Yogyakarta dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat dunia.

Daftar Pustaka:

1. Rahayuningsih, F. (Editor). (2007). *Pengelolaan Perpustakaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
2. Monica Nur Lastiyani, (51), Bidang Pengembangan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Wawancara tanggal 30 Juni 2014 oleh F. Rahayuningsih (41), Pustakawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Sulistyio Basuki, (73), Pakar Kepustakawanan Indonesia. Wawancara tanggal 29 Juni 2014 oleh F. Rahayuningsih (41), Pustakawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Umi Proboyekti, (44), Ketua Dewan Perpustakaan DIY dan Pembina FPPTI DIY. Wawancara tanggal 30 Juni 2014 oleh F. Rahayuningsih (41), Pustakawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
7. <http://dppka.jogjaprovo.go.id/document/infogyogyakarta.pdf> diakses pada tanggal 29 Juni 2014.
8. <http://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/06/Keistimewaan-DIY.pdf> diakses pada tanggal 29 Juni 2014.

***) Pustakawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma**